

BAB III

PENGARUH TSUNAMI TERHADAP DIPLOMASI ACEH

Setiap Negara mempunyai kepentingan nasionalnya masing-masing. Kepentingan tersebut dapat terpenuhi melalui interaksinya dengan Negara-negara lain, lewat jalur kerjasama dan diplomasi. Meskipun kepentingan Negara tersebut sudah terpenuhi, namun belum tentu sesuai dengan yang dibutuhkan di setiap daerah di dalam Negara tersebut, oleh karena itu untuk memenuhi kepentingannya yang lebih spesifik, daerah juga melakukan kerjasama dengan pihak lokal juga internasional. Di Indonesia, provinsi Aceh adalah salah satu daerah yang mempunyai kepentingan daerahnya sendiri yang kemungkinan besar berbeda dengan daerah-daerah lain.

Secara garis besar, kepentingan daerah provinsi Aceh adalah terciptanya keamanan dan kenyamanan serta peningkatan kualitas ekonomi, yang dapat diwujudkan melalui peningkatan kerjasama dan investasi. Sebelum tahun 2005, kepentingan-kepentingan ini sangat sulit tercapai, hingga terjadi bencana tsunami pada tahun 2004. Bencana tsunami telah menarik simpati banyak pihak, yang kemudian pemerintah Aceh memanfaatkan kondisi ini untuk mewujudkan kepentingan daerahnya.

Bencana tsunami yang sebelumnya hanya memberikan duka yang mendalam bagi segenap bangsa Aceh, namun kemudian bencana tersebut memberikan hikmah tersendiri kepada provinsi Aceh secara keseluruhan. Dalam bab ini akan disampaikan terkait pengaruh bencana tsunami terhadap peningkatan *soft power diplomacy* pemerintah Provinsi Aceh. Peningkatan *soft power diplomacy* ini sendiri dimaksudkan agar Provinsi Aceh lebih mudah dalam memenuhi kepentingan daerahnya.

A. Bencana Tsunami Sebagai Modal Baru Dalam Berdiplomasi

Sebagaimana yang telah disebutkan di awal pembahasan bab ini, setiap daerah mempunyai kepentingan daerah tersendiri yang spesifik dan eksklusif dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Untuk memenuhi

kepentingan daerah ini, pemerintah daerah (PEMDA) melakukan hubungan kerjasama dengan daerah-daerah di luar negeri.

Hubungan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam suatu negara dikenal dengan sebutan *paradiplomacy*, yang mengacu pada makna '*the foreign policy of non-central governments*', menurut Aldecoa, Keating dan Boyer.¹ Jika sebelumnya aktivitas hubungan luar negeri hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, maka seiring perkembangan zaman dan aktor internasional, pemerintah daerah dari sebuah negara juga diberi wewenang untuk melakukan hubungan luar negeri. Wewenang itu sendiri diatur melalui Undang-undang untuk mengontrol batas-batas hubungan luar negeri yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah.

Dalam Undang-Undang no. 32 tahun 2004, kewenangan daerah otonom untuk melakukan kerjasama luar negeri ini terdapat dalam pasal 42 ayat (1), bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan persetujuan terhadap kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah, ditegaskan pula dalam penjelasan pasalnya bahwa selain *sister city /province*, pemda juga dapat membuat perjanjian kerjasama teknis termasuk bantuan kemanusiaan, kerjasama penerusan pinjaman/hibah, kerjasama penyertaan modal dan kerjasama lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebelum diberlakukan undang-undang no. 32 tahun 2004 ini, kewenangan melakukan kerjasama internasional telah dimulai sejak diberlakukannya UU tentang pemerintah daerah tahun 1999 atau yang dikenal sebagai undang-undang otonomi daerah.²

Dalam kasus kerjasama internasional yang dapat dilakukan oleh pemerintah Provinsi Aceh, secara lebih spesifik diatur melalui undang-undang tersendiri. Pengaturan kerjasama luar negeri secara khusus diberlakukan untuk pemerintah Aceh diatur melalui undang-undang no. 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, hal ini sesuai dengan identitas Aceh dalam bingkai NKRI dalam status khusus dan istimewa.

¹ Takdir Ali Mukti, *Paradiplomacy*, Hal 2

² Ibid Hal 3

Meskipun kewenangan melakukan hubungan internasional ini bersifat tidak wajib, namun dalam praktik pemerintahan di daerah telah menjadi sebuah keniscayaan karena arus globalisasi yang telah merambah ke seluruh pelosok dunia. Pemda selaku pelaksana pemerintahan yang juga pengambil keputusan dalam kebijakan publik yang strategis seperti investasi dan perdagangan, akan sangat ketinggalan apabila tidak berbaaur ke dalam pergaulan masyarakat internasional.

Di samping itu, untuk memenuhi kepentingan daerahnya, pemda dituntut untuk terlibat dalam pergaulan internasional, tidak cukup jika hanya mengandalkan hubungan internasional yang dilakukan oleh pemerintah pusat saja, apalagi daerah-daerah yang terdapat dalam sebuah negara dengan teritori yang cukup luas seperti Indonesia, sulit untuk mampu memenuhi kepentingan daerah yang kebutuhannya berbeda-beda,³ Pemerintah daerah harus jeli melihat peluang di dunia internasional sesuai kebutuhan daerahnya sendiri. Maka dari itu pemerintah daerah juga harus terampil dalam melakukan hubungan luar negeri. Pemerintah Aceh dengan wilayah yang cukup luas dan potensi yang dimilikinya, mempunyai peluang yang cukup besar dalam melakukan aktifitas internasional. Bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dilakukan adalah seperti eksebisi, kompetensi, pertukaran misi, negosiasi, dan konferensi.⁴ Sedangkan sarannya dapat melalui pariwisata, olahraga, pendidikan, perdagangan, dan kesenian serta bencana alam.

Dengan kewenangan yang cukup luas dari pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang seperti yang telah dipaparkan di atas, maka provinsi Aceh harus mempunyai modal yang besar dalam menjalin hubungan luar negeri. Dalam dinamika hubungan internasional, pemerintah provinsi Aceh kini tidak hanya menggunakan seni dan kebudayaan sebagai sarana diplomasi (sebagaimana yang sering dilakukan sebelumnya), namun juga sebuah modal yang lebih besar yaitu bencana tsunami atau dalam dunia akademik dikenal dengan istilah *disaster diplomacy* (diplomasi bencana).

³Tentu berbeda jika dibandingkan dengan negara yang daerah teritorialnya cukup kecil seperti Singapura, Singapura bisa mengatur semua kebutuhan warga negaranya.

⁴ Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari, *Diplomasi Kebudayaan, Konsep dan Relevansinya bagi Negara Berkembang* : Studi Kasus Indonesia, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2007. Hal 31

Berdasarkan penelitian dan wawancara langsung dengan pihak Badan Investasi dan Promosi Aceh (BAINPROM Aceh), upaya ini memang sudah sering dilakukan dalam menghadiri acara-acara di tingkat nasional dan internasional. Delegasi dari pemerintahan Aceh kerap kali memutar video dan gambar tentang tsunami Aceh yang ternyata terbukti efektif dalam menarik pihak asing untuk melakukan kerjasama dan berinvestasi di provinsi Aceh. Meskipun dalam *event* tersebut tidak ada hubungannya dengan bencana, namun Pemerintah Aceh sering memulai pembahasan dengan bencana tsunami sebagai pembuka pembicaraan. Ternyata, dengan upaya seperti ini, banyak kepentingan daerah Provinsi Aceh dapat terwujud. Dalam interaksinya dengan pihak asing, dalam hal penanggulangan bencana, banyak perluasan kegiatan akhirnya dilakukan antara pemerintah Aceh dengan pihak luar tersebut, seperti dibidang pendidikan dan teknologi.

Dalam memenuhi Kepentingan Nasional, sebuah negara bisa menggunakan *hard Power* dan juga *soft power*. *Hard power* adalah dengan penggunaan kekuatan berupa paksaan dan kekuatan militer serta juga suap, sedangkan *Soft power* adalah kemampuan untuk mendapatkan keinginannya berdasarkan penampilan bangsa di mata pihak lain, baik melalui seni budaya dan kini juga bisa melalui kondisi bencana di negara tersebut. Bagi sebuah daerah seperti Provinsi Aceh, penggunaan *hard power* hampir mustahil dilakukan, mengingat kekuatan dan kemampuan yang sangat terbatas, maka satu-satunya jalan untuk memenuhi kepentingan daerah adalah penggunaan *soft power*, dan *soft power* yang kerap kali ditunjukkan adalah melalui seni budaya dan juga bencana tsunami.

Dalam pengantar buku “Hasan Tiro dari imajinasi Negara Islam ke imajinasi etno nasionalis”⁵, Ahmad Taufan Damanik menjelaskan bahwa Aceh setelah MoU Helsinki dan Bencana Tsunami mengalami “internasionalisasi.” Oleh karena itu, apabila Aceh tidak siap dengan kondisi ini, maka Aceh hanya akan menjadi objek, yang akan dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan global. Dari

⁵ Ahmad Taufan Damanik, *Hasan Tiro dari imajinasi Negara Islam ke imajinasi etno nasionalis*, Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung (FES) dan Aceh Future Institute (AFI), 2010. Hal : 8

peristiwa “internasionalisasi” Aceh melalui tsunami dan pasca MoU Helsinki ini, provinsi Aceh bisa berperan untuk menggunakan kesempatan memanfaatkan moment berbicara lebih banyak dalam aktivitas internasional. Provinsi Aceh diharapkan tidak hanya menjadi objek melainkan juga menjadi subjek yang mampu memperjuangkan kepentingan daerahnya sendiri.

B. Bencana Tsunami Sebagai Pemersatu dan Awal Peningkatan Kualitas Ekonomi

Sebelum terjadi bencana tsunami, Provinsi Aceh sejak tahun 1976 hingga 2004 terkenal sebagai daerah konflik dalam wujud separatisme, yang mana Aceh ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pihak RI untuk penyelesaian kasus ini, Setiap pergantian Presiden RI ada kebijakan yang berbeda dilakukan untuk menyelesaikan konflik Aceh, namun baru mencapai kesepakatan damai pada masa presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui perundingan yang dilangsungkan di Helsinki.

Pada masa presiden-presiden sebelumnya kebanyakan menggunakan upaya konfrontatif dalam menyelesaikan kasus konflik separatis Aceh. Alhasil, bukannya menyelesaikan masalah, melainkan konflik semakin besar dan kelompok separatis semakin solid serta yakin dengan yang sedang diperjuangkan. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya kontak senjata antara RI dan GAM, ditambah pelanggaran HAM dari pihak TNI yang semakin mempertajam konflik di Aceh.

Pergantian presiden memang secara otomatis merubah cara pemerintah dalam menanggapi konflik, mungkin karena *background* dari presiden itu sendiri. Pada masa pemerintahan presiden SBY, pendekatan yang lebih persuasif digunakan, dengan didukung oleh terjadinya bencana tsunami, upaya penyelesaian konflik Aceh pun akhirnya dapat terselesaikan dengan baik dan berkelanjutan. Bencana tsunami salah satu hal yang tidak bisa diabaikan dari terwujudnya perdamaian antara GAM dan RI. Bencana tsunami muncul di saat konflik yang berlangsung sudah berada di eskalasi puncak, dan tsunami membawa momentum untuk dialngsungkan perdamaian.

Tabel I. Upaya Penyelesaian Konflik Aceh dari masa presiden Soeharto hingga presiden Susilo Bambang Yudhoyono⁶

Periode Pemerintahan	Kebijakan Penyelesaian Konflik Aceh	Hasil/ Dampak
Presiden Soeharto (1976-1998)	Pendekatan militer dengan menekankan pada Operasi Jaringan Merah untuk menumbuhkan GAM (1990-1995)	1. Stabilitas keamanan dan politik di Aceh terjamin. GAM menyingkirkan keluar negeri 2. Dampaknya, hancur kekerasan dan pelanggaran HAM. 3. Muncul generasi dendam yang mendukung GAM.
Presiden Habibie (1998-1999)	Kombinasi pendekatan antara operasi keamanan dengan kebijakan politik.	Sebagian besar operasi keamanan yang dilakukan tidak efektif mengurangi atau menghambat pertumbuhan GAM. Kebijakan politik. 10 program Habibie untuk Aceh tidak dapat dilaksanakan karena yang bersangkutan hanya kurang dari satu tahun menjadi presiden.
Presiden Abdurrahman Wahid	1. Jeda Kemanusiaan 2. Penghentian permusuhan (CoHA) 3. Inpres IV/2001 untuk penanganan masalah konflik Aceh 4. Otonomi Khusus Bagi Aceh	1. Langkah dan janji Habibie tidak diteruskan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. 2. Jeda Kemanusiaan tidak efektif untuk menghentikan kekerasan. 3. CoHA mengalami kegagalan karena gencatan senjata yang menjadi acuan utamanya tidak diindahkan oleh kedua belah pihak.

⁶Muhammad Jafar. AW, *Perkembangan Dan Prospek Partai Politik Lokal Di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Tesis - Magister Ilmu Politik pada Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro. 2009, Hal 84.

<p>Presiden Megawati Soekarnoputri</p>	<p>1. Otonomi Khusus Aceh, UU No 18 tahun 2001 2. Inpres No VII/2001 tentang penanganan masalah konflik Aceh. 3. Melanjutkan CoHA. 4. Darurraat militer di Aceh, Kepres No 23/2003 berlaku 19 Mei 2003 dan berakhir 18 Mei 2004</p>	<p>1. pemberian otonomi khusus tidak dapat meredam tuntutan kemerdekaan dari GAM, karena prosesnya ditentukan oleh pemerintah pusat tanpa melibatkan kelompok GAM. 2. Inpres No VII/2001 tidak dapat berjalan maksimal, karena program penanganan konflik melalui CoHA untuk penghentian permusuhan tidak dijadikan sebagai dasar kebijakan utama. 3. CoHA gagal karena orientasi pemerintah pusat yang memandang CoHA sebagai keturunan GAM untuk memperbesar kelompoknya. 4. Operasi terpadu melalui darurat militer gagal dilakukan karena operasi terpadu pincang, lebih pada operasi militer, kurang disertai oleh operasi kemanusiaan, peningkatan kinerja pemerintahan dan operasi penegakan hukum.</p>
<p>Presiden Susilo Bambang Yudhoyono</p>	<p>1. Perundingan di Helsinki</p>	<p>1. Perubahan status Aceh menjadi Self Government 2. Aceh tetap dalam bingkai NKRI 3. Aceh berhak menguasai 70% sumber daya alam 4. Terciptanya perdamaian yang</p>

		kondusif dan berkelanjutan 5. Sebagian besar para anggota TNI ditarik dari tanah Aceh ⁷
--	--	---

Dalam upaya penyelesaian konflik Aceh, bencana tsunami memiliki peran penting dalam mewujudkan perdamaian. Hal ini disebabkan bencana tsunami memunculkan *Timing* yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan. Dalam melaksanakan sebuah negosiasi, *timing* merupakan suatu hal yang sangat penting. Provinsi Aceh mengalami kekurangan sumber bantuan dari dalam daerah untuk para korban gempa dan tsunami, di lain pihak Indonesia dan bantuan internasional siap membawa bantuan yang melimpah dan akan membantu provinsi Aceh untuk bangkit setelah gempa dan tsunami, sehingga ini menjadi waktu yang tepat untuk penyelesaian konflik antara GAM dan RI. Hal serupa juga diamini oleh Ilan kelman yang menyatakan bencana tsunami sebagai alat diplomasi.

Bencana Tsunami memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan provinsi Aceh. Berdasarkan penelitian yang kami lakukan, ada skema yang mengantarkan kepada peningkatan perkembangan ini. Mulai tahun 1970-an Provinsi Aceh dikenal sebagai daerah rawan konflik dan tingkat keamanannya yang sangat kurang, hal ini diakibatkan oleh kriminalitasnya yang cukup tinggi dan perang saudara dalam bingkai separatisme antara GAM dan RI. Namun setelah terjadi bencana tsunami pada tahun 2004, dapat menarik banyak simpati dari pihak lokal maupun pihak internasional, yang kemudian melahirkan solidaritas dari pihak tersebut untuk membantu dan memulihkan provinsi Aceh seperti semula. Lahirlah kesepakatan MoU Helsinki pada tahun 2005, dan bantuan-bantuan pun berangsur datang dari berbagai penjuru dunia untuk membantu Aceh dan yang paling penting dari berkah kesepakatan damai GAM dan RI, alhasil tingkat keamanan di Aceh juga berangsur membaik sehingga menarik pihak lokal maupun asing untuk berkerjasama dan berinvestasi di provinsi Aceh.

⁷ Untuk Masa Penyelesaian konflik pada masa presiden SBY adalah tambahan dari penulis sendiri guna melengkapi penyelesaian konflik Aceh dari masa presiden Soeharto hingga SBY

Dari data yang kami dapatkan, ada peningkatan yang sangat signifikan terjadi dalam hal investasi di Provinsi Aceh. Berikut data investasi yang terjadi di Aceh sebelum dan sesudah tsunami :

Tabel II. Perkembangan PMDN hingga tahun 2013

No.	Tahun	Jumlah Perusahaan
1.	1990	3
2.	1991	5
3.	1992	2
4.	1993	1
5.	1994	2
6.	1995	1
7.	1996	5
8.	1997	7
9.	1998	3
10.	1999	2
11.	2000	3
12.	2001	-
13.	2002	1
14.	2003	3
15.	2004	1
16.	2005	2
17.	2006	2
18.	2007	1
19.	2008	-
20.	2009	3
21.	2010	12
22.	2011	137
23.	2012	111
24.	2013	100

Dari tabel di atas dapat dilihat perkembangan yang terjadi di Aceh dari segi investasi, yaitu penanaman modal dalam negeri (PMDN). Banyak PMDN yang tertarik berinvestasi di Aceh, apalagi dengan potensi dan kekayaan alam melimpah yang dimiliki Provinsi Aceh. Setelah terjadi bencana tsunami, terdapat perubahan besar dalam hal keamanan, kenyamanan, dan regulasi yang mempermudah aktivitas kerjasama dan investasi.

Hal yang serupa juga terjadi dari investasi asing di Aceh yang meningkat sangat pesat setelah bencana tsunami. Banyak peluang yang tercipta setelah

bencana tsunami pada tahun 2004 tersebut. Dari peluang-peluang itu, banyak kerjasama yang tercipta antara Aceh dan pihak asing seperti bidang pertanian, pendidikan, dan juga teknologi. Berdasarkan data yang kami dapatkan dari Bainprom Aceh, terlihat jelas perkembangan investasi asing dari tahun ke tahun seperti yang dipaparkan dalam tabel di awah ini.

Tabel III. Perkembangan PMA hingga tahun 2013

No.	Tahun	Jumlah Perusahaan
1.	1990	1
2.	1991	-
3.	1992	-
4.	1993	-
5.	1994	2
6.	1995	-
7.	1996	2
8.	1997	1
9.	1998	2
10.	1999	-
11.	2000	2
12.	2001	1
13.	2002	-
14.	2003	-
15.	2004	1
16.	2005	3
17.	2006	1
18.	2007	7
19.	2008	20
20.	2009	26
21.	2010	49
22.	2011	36
23.	2012	21
24.	2013	53

Setelah terjadi bencana tsunami tahun 2004 dan “internasionalisasi” Aceh, banyak sekali kerjasama yang terjalin dengan pihak-pihak internasional, baik itu dengan Negara-negara arab maupun non-arab. Meskipun provinsi Aceh merupakan sebuah daerah dengan penduduk yang sangat menjunjung tinggi syari’at islam, namun ternyata tidak menjadikan Aceh hanya berkerjasama dengan

Negara-negara Islam, Aceh juga menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan Negara-negara lain yang bukan Negara Islam, seperti Jepang dan juga Swiss.

C. Peningkatan Kerjasama Provinsi Aceh Sebelum dan Sesudah Tsunami

Berdasarkan wawancara dengan pihak BAINPROM Aceh, dijelaskan bahwa setidaknya ada dua penyebab sulitnya menjalin kerjasama sebelum terjadi bencana tsunami. Faktor penyebab sulitnya kerjasama sebelum tsunami tersebut adalah :

1. Konflik RI dan GAM

Tindakan separatisme yang terjadi di Aceh yang dimotori oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM), telah mengakibatkan Provinsi Aceh menjadi tertutup dengan pihak luar, baik di dalam negeri juga luar negeri. Walaupun ada beberapa interaksi yang dilakukan dengan luar negeri seperti dengan Swedia dan Libya, hubungan tersebut masih merupakan bagian dari upaya separatis, bukan kerjasama dalam usaha pembangunan dan peningkatan kualitas ekonomi Aceh. Konflik yang terjadi selama lebih 30 tahun, selama itu pula Aceh tertutup untuk berkerjasama dengan pihak luar.

2. Kurangnya Keamanan dan Kenyamanan

Seiring dengan konflik yang berkepanjangan yang terjadi di provinsi Aceh, maka keamanan dan kenyamanan di Aceh juga semakin kurang. Dalam hal kerjasama luar negeri, perlu dipahami bahwa bukan dari pihak Aceh yang enggan berkerjasama dengan pihak asing, namun pihak asing sendiri yang tidak tertarik untuk berkerjasama dengan Aceh. Alasannya adalah keamanan dan kenyamanan yang merupakan salah satu syarat dalam berhubungan kerjasama internasional dan juga investasi. Bahkan beberapa perusahaan yang sebelumnya beroperasi di Aceh akhirnya berhenti beroperasi seperti *Exxon Mobile*, karena faktor keamanan. Selain itu pihak luar juga *enggan* berkerjasama dengan Aceh dikarenakan identitas Aceh yang sedang berkonflik dengan negaranya, Indonesia. Logikanya

adalah jika pihak asing berkerjasama dengan Aceh akan dicurigai sedang membantu Aceh dalam upaya separatisme, ini tentu dapat merusak hubungan pihak asing tersebut dengan negara Indonesia.

Penyebab-penyebab di atas perlahan dapat diatasi dimulai sejak terjadinya bencana tsunami di Aceh pada tahun 2004. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, setelah bencana tsunami Aceh (dalam hal ini GAM) berdamai dengan RI, selaras dengan perdamaian tersebut maka keamanan dan kenyamanan pun tercipta di Provinsi Aceh. Tingkat kriminalitas di Aceh yang menurun drastis dan juga kenyamanan berinvestasi dari segi regulasi dan infrastruktur terus diperbaiki guna mendukung pembangunan Aceh pasca bencana tsunami dan konflik.

Kerjasama dan investasi di Aceh pun meningkat drastis dilihat dari setiap tahunnya setelah bencana tsunami. Bencana Tsunami sudah menjadi *soft Power diplomacy* baru bagi pemerintah Aceh. Jika pemerintah daerah Aceh bisa bersinergi dengan pemerintah pusat, maka akan menambah percepatan pembangunan bagi daerah Aceh.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, peluang kerjasama Aceh dengan Asing bertambah banyak, termasuk juga dibidang investasi. Presiden Jokowi mempermudah para investor untuk masuk ke Indonesia dan bekerjasama dengan daerah-daerah di Indonesia. Aceh dengan wilayahnya yang sangat strategis untuk perdagangan dan kerjasama di bidang pertanian juga di bidang kemaritiman. Aceh didukung dengan keberadaan pelabuhan-pelabuhan dengan fasilitas-fasilitas modern.

Drs. Amnal Rachman menyebutkan, pemerintah daerah sudah diberikan wewenang untuk melakukan kerjasama luar negeri, dengan fasilitas dan kemudahan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah harus terampil dalam mempromosikan daerahnya masing-masing, demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian kepentingan daerah pun telah terpenuhi.

Dalam melakukan promosi dan kerjasama luar negeri, Pemda Aceh sudah cukup inovatif, dimana sebelum tahun 2015, BKPM pusat melatih para pegawai-

pegawai dari Pemda dalam hal kerjasama luar negeri, termasuk dalam mempromosikan daerah. Pada tahun-tahun tersebut, BKPM pusat membuat program kerja, dalam program tersebut BKPM pusat mengubah target promosi ke Negara-negara berbeda setiap tahunnya, Pemda hanya mengikuti semua intruksi dan arahan dari pusat. Namun pada tahun 2015, Pemda Aceh salah satunya melihat bahwa program seperti ini tidaklah efektif.

Sejak itulah Pemda Aceh berinisiatif untuk mempromosikan daerah Aceh dengan cara berbeda, yaitu dengan memperhatikan Negara mana saja yang tertarik bekerjasama dengan Aceh, baru kemudian melakukan promosi ke Negara tersebut dengan melihat kerjasama di bidang apa saja yang kemungkinan akan sesuai dan sukses dilakukan dengan Negara itu.

Dalam proses diplomasi untuk menarik investasi dan kerjasama internasional ini, Pemda Aceh menggunakan semua keterampilannya dalam mempromosikan Aceh, salah satunya dengan menggunakan bencana tsunami. Untuk lebih efektif dalam melakukan kerjasama dan promosi, Pemda Aceh juga mengajak pemimpin-pemimpin Kabupaten, yang lebih paham potensi-potensi di daerah-daerah, termasuk daerah paling terdalam. Sebagai contoh, pada beberapa tahun terakhir ini, Pemda Aceh sedang fokus bekerjasama dan mempromosikan kopi Aceh ke luar negeri, salah satu Negara tujuan terbesar adalah Amerika Serikat. Pada saat berdiplomasi dengan pihak Amerika, Pemda Aceh juga mengajak pemimpin di Kabupaten-Kabupaten penghasil kopi terbanyak di Aceh, yaitu Aceh Tengah dan Beuner Meuriah.

Berdasarkan paparan di atas dapat dipahami bahwa menggunakan bencana alam sebagai sarana diplomasi cukup efektif. Upaya ini ternyata berhasil untuk menarik kerjasama dengan luar negeri. Bencana yang pada mulanya digunakan, setelah beberapa kegiatan berlangsung, maka kemudian akan merambat kepada kerjasama-kerjasama lain yang saling menguntungkan kedua pihak.

Pemerintah Provinsi Aceh dengan kewenangannya yang sangat luas berdasarkan undang-undang, dapat terus mengembangkan kerjasama luar negerinya untuk dapat memenuhi kepentingan daerahnya dan demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Kedepan upaya ini akan terus diperbaiki untuk

kemajuan pembangunan Aceh, pasca konflik dan bencana tsunami yang sempat melululantahkan provinsi Aceh beberapa tahun silam. Sebagaimana pribahasa yang sering diungkap oleh masyarakat Aceh, "*Pat Ujeun yang hana Pirang, Pat Prang yang hana reda.*" Demikian untuk menggambarkan bahwa suatu musibah pasti akan berlalu, dan masa depan yang lebih baik akan dapat diraih. ****